



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK  
DEPARTEMENT ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAK KEBIJAKAN PERPAJAKAN

TESIS

TINGKAT KEMATANGAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT*  
DI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
(STUDI KASUS SITUS www.pajak.go.id)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mancapai Gelar  
Magister Sains (Msi) dalam Ilmu Administrasi

Oleh :

Nama : Novirnawaty  
NPM : 0606018040

Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Publik

JAKARTA  
Desember, 2008

## Lembar Pernyataan Orisinalitas

**Tesis ini adalah**

Hasil karya saya sendiri, dan  
Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Novirnawaty  
0606018040

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

Novirnawaty  
0606018040

TINGKAT KEMATANGAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK (STUDI KASUS SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

xiv + 103 halaman + 35 gambar + 7 tabel + Daftar Pustaka (20 buku, 6 jurnal,  
6 artikel, 7 peraturan) + 4 Lampiran

Pengembangan *e-government* merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). *E-government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. *E-government* juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.

Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi *e-government*, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat service *maturity* implementasi *e-government* pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), kemudian bagaimana tingkat delivery *maturity* implementasi *e-government* pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall *maturity* implementasi *e-government* pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ?

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan *e-government* situs pajak.go.id masih berada pada level *Innovative Leader* menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki

kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan *online* dan meningkatkan layanan *delivery maturity*.



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SCIENCE  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
POST GRADUATE PROGRAM  
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAM  
MAJORING ADMINISTRATIVE AND TAX POLICY**

**ABSTRACT**

**Novirnawaty  
0606018040**

**MATURITY LEVEL OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT  
IN GENERAL DIRECTORATE OF TAXES (CASE STUDY IN www.pajak.go.id)**

**xiv + 103 pages + 35 pictures + 7 table + Bibliography (20 books, 6 articles,  
6 journal, 7 rules) + 4 Enclosures**

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance).

E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.

The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials

Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?

The results of the research, it is known that the level of maturity e-government site pajak.go.id still at the level of clarity innovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity.



## Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan ALLAH S.W.T, dengan memberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini yang digunakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pada penulisan tesis ini, peneliti telah dibantu oleh banyak pihak, oleh karena itu perlu mengucapkan terima kasih tak terhingga, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UI dan juga selaku ketua sidang.
2. Ibu Dr. Haula Rosdiana, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna membimbing peneliti dengan segala kebaikan, kesabaran dan kemurahan hatinya.
3. Bapak Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak sebagai Pembaca Ahli yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
4. Bapak Zuliansyah P Zulkarnain, S.Sos., MSi, sebagai Sekretaris Sidang yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
5. Seluruh keluarga di rumah Mama, Mas Ros, Uni, Vivin, Devi, Yurvi, Arshe, Donny, keponakan-keponakanku tercinta Adi, Affan dan Dimas atas do'a, dukungan serta keceriannya.
6. Teriring do'a untuk almarhum Papa tercinta yang sempat memberikan dukungan sebelum kepergiannya.
7. Mojo, Mbak Elsy, Dhani, Haekal, Andy, Pak Sanan, Pak Heru dan Mbak Yucca atas dukungannya untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pasca Sarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan khususnya Angkatan XII.
9. Seluruh staf pengajar, staf sekretariat dan staf perpustakaan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Khususnya Mas Deni, Mas Erwin, Mbak Ninik dan Mas Pri.

10. Ibu Susi Susilowati yang telah membuka pikiran penulis dan di tengah kesibukannya bersedia untuk di wawancarai.
11. Semua rekan-rekan di Artajasa, khususnya Bapak Nuri Wicaksana dan Bapak Heru Perwito, yang telah memberikan semangat dan banyak kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, Desember 2008

Novirnawaty



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Lembar Pernyataan Originalitas .....	ii
Abstract .....	iii
Abstrak .....	v
Lembar Persetujuan Tesis .....	vii
Lembar Pengesahan Tesis .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
 <b>BAB I Pendahuluan</b>	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Pokok Permasalahan .....	5
I.3 Tujuan Penelitian .....	5
I.4 Signifikansi Penelitian .....	5
I.5 Sistematika Penelitian .....	6
 <b>BAB II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian</b>	8
II.1 Tinjauan Literatur .....	8
II.1.1 Pelayanan Publik .....	8
II.1.2 Sistem Perpajakan .....	12
II.1.3 Definisi E-government .....	15
II.1.4 Beberapa Manfaat E-government .....	16
II.1.5 Langkah-langkah Meningkatkan E-government .....	17
II.1.6 Pengembangan E-government menjadi E-Governance .....	24
II.1.7 Portal .....	26
II.1.8 CRM dan Dukungan TI .....	27
II.2 Model Analisis .....	29
II.3 Operasionalisasi Konsep .....	31
II.4 Metode Penelitian .....	32
II.4.1 Pendekatan Penelitian .....	32

II.4.2 Jenis Penelitian .....	33
II.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	33
II.4.4 Teknik Pengolahan Data .....	35
II.4.5 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB III    Gambaran Umum Implementasi E-Government Pada Situs pajak.go.id</b>	<b>40</b>
III.1 Sistem E-government pada Situs Pajak.go.id .....	40
III.2 Implementasi E-government Situs Pajak.go.id .....	43
<b>BAB IV    Pembahasan dan Hasil Analisis</b>	<b>69</b>
IV.1 Analisa Service Maturity Situs <u>www.pajak.go.id</u> .....	69
IV.2 Analisa Delivery Maturity Situs <u>www.pajak.go.id</u> .....	93
IV.3 Analisa Overall Maturity Situs <u>www.pajak.go.id</u> .....	97
<b>BAB V    Kesimpulan dan Saran</b>	
V.1 Simpulan .....	102
V.2 Saran .....	101
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian dan Pelayanan Publik	9
Tabel II.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian Tingkat Kematangan e-government di Situs pajak.go.id	31
Tabel II.3 Level Service Maturity	36
Tabel II.4 Level Delivery Maturity	37
Tabel II.5 Level Overall Maturity	38
Tabel IV.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Service Maturity Situs pajak.go.id	90
Tabel IV.2 Rekapitulasi Hasil Analisis Delivery Maturity Situs pajak.go.id	96



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1	Kurva Strategi E-government
Gambar II.2	Overlapping Domain E-governance
Gambar II.3	Model Analisis Tingkat Kematangan E-government Direktorat Jendral Pajak Indonesia
Gambar III.1	Halaman Menu Utama Situs <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>
Gambar III.2	Halaman Menu Peraturan Perpajakan
Gambar III.3	Halaman Menu Informasi
Gambar III.4	Halaman Menu Berita Perpajakan
Gambar III.5	Halaman Menu Kurs pajak
Gambar III.6	Halaman Menu Download
Gambar III.7	Halaman Menu Link Situs
Gambar III.8	Proses Pembuatan e-FIN
Gambar III.9	Tata Cara e-Filling
Gambar III.10	Halaman Menu FATQ
Gambar III.11	Halaman Menu Serba Serbi
Gambar III.12	Halaman Fasilitas Kritik dan Saran
Gambar III.13	Halaman Fasilitas Polling
Gambar III.14	Halaman Fasilitas Pencarian Alamat Kantor Pajak
Gambar III.15	Halaman Kontak & pencarian Alamat Kantor pajak
Gambar III.16	Halaman Informasi dan Link Layanan E-registration
Gambar III.17	Halaman Informasi dan Link Layanan E-NPWP
Gambar IV.1	Halaman Home Situs pajak.go.id
Gambar IV.2	Halaman Kontak
Gambar IV.3	Halaman Site Map
Gambar IV.4	Halaman View Struktur Organisasi
Gambar IV.5	Halaman Help
Gambar IV.6	Halaman Pencarian Peraturan Perpajakan
Gambar IV.7	Halaman Peraturan Terbaru

Gambar IV.8	Halaman Tarif & PTKP Wajib Pajak Badan	78
Gambar IV.9	Halaman Galeri Foto	79
Gambar IV.10	Halaman Cari Alamat Kantor Pajak	80
Gambar IV.11	Halaman Access Denied	82
Gambar IV.12	Halaman Polling Sunset Policy	83
Gambar IV.13	Email ke Bagian Pengaduan Pajak	84
Gambar IV.14	Halaman Utama Ortax.org	89
Gambar IV.15	Halaman Payment Singapura gov.sg	100

